

IMPLEMENTASI PERKULIAHAN PENDIDIKAN PANCASILA SEBAGAI SARANA PEMBENTUKAN CIVIC VIRTUE MAHASISWA

Arif Subowo¹, Apeles Lexi Lonto²

^{1,2}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Manado, Manado

Corresponding author: arifsubowo@unima.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi perkuliahan Pendidikan Pancasila sebagai sarana pembentukan *civic virtue* (kebajikan kewarganegaraan) pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Negeri Manado. Di tengah tantangan era digital dan globalisasi yang berpotensi mengikis nilai-nilai kebangsaan, pembentukan *civic virtue* menjadi krusial, terutama bagi calon pendidik kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan mahasiswa dan dosen, serta analisis dokumen kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkuliahan Pendidikan Pancasila di Prodi PPKn UNIMA telah berupaya mengintegrasikan pembentukan *civic virtue* melalui metode pembelajaran yang beragam seperti studi kasus, diskusi kritis, dan proyek kewarganegaraan. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti keterbatasan internalisasi nilai secara personal oleh mahasiswa dan dominasi pendekatan teoretis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun perkuliahan telah menjadi sarana penting, diperlukan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan reflektif untuk mentransformasikan pengetahuan Pancasila menjadi *civic virtue* yang terinternalisasi dan termanifestasi dalam perilaku mahasiswa sehari-hari.

Kata kunci: Pendidikan Pancasila, *Civic Virtue*, Mahasiswa

ABSTRACT

This study aims to analyze in-depth the implementation of Pancasila Education courses as a means of fostering civic virtue among students in the Pancasila and Citizenship Education (PPKn) Study Program at Manado State University. Amidst the challenges of the digital era and globalization, which have the potential to erode national values, fostering civic virtue is crucial, especially for prospective civic educators. This study employed a qualitative approach with a case study method. Data collection was conducted through participant observation, in-depth interviews with students and lecturers, and analysis of curriculum documents. The results indicate that Pancasila Education courses in the PPKn Study Program at UNIMA have attempted to integrate civic virtue development through diverse learning methods such as case studies, critical discussions, and citizenship projects. However, its implementation faces challenges such as limited personal internalization of values by students and the dominance of theoretical approaches. This study concludes that although lectures have been an important tool, more innovative and reflective learning strategies are needed to transform Pancasila knowledge into civic virtue that is internalized and manifested in students' daily behavior.

Keywords: Pancasila Education, *Civic Virtue*, Students

PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi di Indonesia mengemban amanat untuk tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademis, tetapi juga warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Salah satu pilar utama dalam upaya ini adalah Pendidikan Pancasila, yang diposisikan sebagai mata kuliah wajib untuk menanamkan ideologi dan falsafah bangsa. Dalam konteks

kekinian, peran Pendidikan Pancasila menjadi semakin vital sebagai benteng pertahanan terhadap berbagai tantangan ideologis, seperti radikalisme, individualisme ekstrem, dan pragmatisme yang dibawa oleh arus globalisasi dan digitalisasi (Arif, 2021). Tujuan utamanya bukan sekadar transfer pengetahuan tentang sila-sila Pancasila, melainkan pembentukan karakter yang berlandaskan nilai-nilai luhur tersebut.

Konsep sentral yang relevan dalam pembentukan karakter warga negara adalah *civic virtue* atau kebajikan kewarganegaraan. *Civic virtue* merujuk pada serangkaian disposisi, komitmen, dan kebiasaan moral yang diperlukan untuk keberhasilan sebuah komunitas yang demokratis (Nasiwan & Rahmia, 2021). Ini mencakup nilai-nilai seperti toleransi, kejujuran, tanggung jawab sosial, partisipasi aktif, dan penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia. Tanpa warga negara yang memiliki *civic virtue*, institusi demokrasi akan rapuh dan rentan terhadap disfungsi. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi memiliki mandat strategis untuk menumbuhkembangkan *civic virtue* ini (Sapriya, 2017).

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berada pada posisi yang unik dan krusial. Mereka tidak hanya menjadi subjek dari pendidikan karakter, tetapi juga calon agen utama yang akan menyebarluaskan nilai-nilai kewarganegaraan di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Keberhasilan mereka dalam menginternalisasi dan memanifestasikan *civic virtue* akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan kewarganegaraan di masa depan. Dengan demikian, menganalisis efektivitas perkuliahan Pendidikan Pancasila dalam membentuk *civic virtue* pada mahasiswa PPKn menjadi sebuah urgensi penelitian. Universitas Negeri Manado (UNIMA), sebagai salah satu lembaga pencetak tenaga pendidik di Indonesia Timur, menjadi lokus yang representatif untuk studi ini.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya penguatan karakter mahasiswa PPKn (Susanto, 2018) dan tantangan dalam

implementasi pembelajaran di era digital (Tantowi, dkk., 2022). Studi lain juga mengkaji implementasi nilai-nilai *civic virtue* di perguruan tinggi secara umum (Winataputra, 2019). Namun, penelitian yang secara spesifik dan mendalam mengkaji bagaimana proses perkuliahan Pendidikan Pancasila diimplementasikan sebagai sarana pembentukan *civic virtue* pada mahasiswa PPKn masih terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menangkap kompleksitas proses, makna, dan pengalaman yang dialami oleh mahasiswa dan dosen. Fokus penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan: (1) Bagaimana implementasi perkuliahan Pendidikan Pancasila pada mahasiswa PPKn Universitas Negeri Manado?; (2) Bagaimana perkuliahan tersebut berkontribusi pada pembentukan *civic virtue* mahasiswa?; dan (3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses tersebut?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan holistik, dalam konteks alamiahnya, dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Creswell & Poth, 2018). Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap "kasus" yang dibatasi, yaitu implementasi perkuliahan Pendidikan Pancasila dan dampaknya terhadap pembentukan *civic virtue* pada mahasiswa PPKn di Universitas Negeri Manado. Pendekatan ini relevan untuk mengungkap proses, dinamika, dan makna di balik fenomena yang diteliti, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado. Waktu penelitian berlangsung selama tiga bulan, dari September hingga November 2025. Subjek penelitian adalah para pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam perkuliahan Pendidikan Pancasila, yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan utama terdiri

dari 15 mahasiswa PPKn dari angkatan yang berbeda (semester 3, 5, dan 7) untuk mendapatkan variasi perspektif dan pengalaman. Selain itu, 3 orang dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila juga diwawancara sebagai informan kunci untuk memberikan data mengenai perancangan dan pelaksanaan pembelajaran.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga cara utama. Pertama, observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat dalam beberapa sesi perkuliahan (baik daring maupun luring) untuk mengamati secara langsung metode pengajaran, interaksi dosen-mahasiswa, dan dinamika diskusi kelas. Kedua, wawancara mendalam semi-terstruktur dilakukan dengan mahasiswa dan dosen untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pemaknaan mereka terhadap perkuliahan dan relevansinya dengan pembentukan *civic virtue*. Wawancara ini direkam dan ditranskripsi secara verbatim. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis Rencana Pembelajaran Semester (RPS), materi ajar, tugas-tugas mahasiswa, dan dokumen kurikulum terkait untuk memahami kerangka formal dari implementasi perkuliahan.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan mengikuti model yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri dari tiga alur kegiatan simultan: (1) reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data mentah dari transkrip wawancara dan catatan lapangan; (2) penyajian data (*data display*), yaitu proses mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk matriks, bagan, atau narasi sehingga mudah dipahami; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*), yaitu proses penarikan makna dari data yang telah disajikan, yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung untuk memastikan validitas temuan. Triangulasi sumber (membandingkan data dari mahasiswa, dosen, dan dokumen) dan triangulasi metode (membandingkan data dari observasi, wawancara, dan dokumen) digunakan untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang terkumpul melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen, hasil penelitian dan pembahasan disajikan dalam tiga bagian utama yang menjawab pertanyaan penelitian: implementasi perkuliahan, perannya dalam membentuk *civic virtue*, serta faktor pendukung dan penghambat.

1. Implementasi Perkuliahan Pendidikan Pancasila

Implementasi perkuliahan Pendidikan Pancasila di Program Studi PPKn Universitas Negeri Manado secara kurikuler telah dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan karakter. Analisis terhadap Rencana Pembelajaran Semester (RPS) menunjukkan bahwa Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) tidak hanya menargetkan penguasaan kognitif (*civic knowledge*) tentang sejarah, filosofi, dan implementasi Pancasila, tetapi juga menyentuh ranah afektif dan psikomotorik. Terdapat penekanan pada sikap (misalnya, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri) dan keterampilan (misalnya, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan analisis informasi dan data).

Dari segi metode pembelajaran, observasi menunjukkan adanya variasi strategi yang diterapkan oleh dosen. Selain metode ceramah konvensional untuk menyampaikan konsep-konsep dasar, dosen juga aktif menggunakan metode yang lebih partisipatif. Metode yang paling sering dijumpai adalah diskusi kelompok dan studi kasus. Mahasiswa diberikan isu-isu kontekstual yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti kasus intoleransi, korupsi, atau sengketa lahan, kemudian diminta untuk menganalisisnya dari berbagai perspektif sila Pancasila. Seorang dosen menyatakan, *"Tujuannya agar mereka tidak hanya hafal Pancasila, tapi bisa menggunakannya sebagai pisau analisis untuk masalah nyata di masyarakat. Ini melatih civic skills mereka."*

Selain itu, beberapa dosen menerapkan model pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*). Mahasiswa secara berkelompok ditugaskan

untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat sederhana, seperti kampanye anti-hoax berbasis nilai persatuan, atau kegiatan literasi Pancasila untuk anak-anak di lingkungan sekitar kampus. Proyek semacam ini secara langsung mendorong mahasiswa untuk mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dan mengembangkan *civic disposition*, seperti kepedulian sosial dan tanggung jawab. Namun, implementasi metode-metode inovatif ini belum merata di semua kelas dan seringkali bergantung pada inisiatif masing-masing dosen.

2. Peran Perkuliahan dalam Pembentukan *Civic Virtue* Mahasiswa

Wawancara dengan mahasiswa menunjukkan bahwa perkuliahan Pendidikan Pancasila memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan *civic virtue* mereka, terutama pada tiga aspek utama: pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*).

Pada domain *civic knowledge*, mahasiswa mengakui bahwa perkuliahan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan filosofis tentang Pancasila, melampaui apa yang mereka pelajari di sekolah menengah. Seorang mahasiswa semester 5 mengungkapkan, *"Dulu saya kira Pancasila itu ya cuma lima sila yang dihafal. Setelah kuliah, saya jadi paham bahwa setiap sila punya makna mendalam dan saling terkait untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara."* Pemahaman ini menjadi fondasi intelektual bagi pembentukan kebijakan kewarganegaraan.

Pada domain *civic skills*, metode studi kasus dan diskusi kritis terbukti efektif dalam mengasah kemampuan analisis dan argumentasi mahasiswa. Mereka belajar untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang dan merumuskan solusi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Seperti yang diungkapkan seorang mahasiswa, *"Saat diskusi kasus intoleransi, kami dipaksa untuk berpikir kritis, tidak hanya menyalahkan satu pihak. Kami belajar bagaimana nilai kemanusiaan dan persatuan harus dikedepankan."* Keterampilan ini merupakan komponen esensial dari partisipasi warga negara yang cerdas dan konstruktif.

Pada domain *civic disposition*, perkuliahan ini berkontribusi dalam menumbuhkan kepekaan dan kepedulian sosial. Melalui tugas proyek dan analisis isu-isu sosial, mahasiswa merasa lebih terhubung dengan realitas masyarakat. Tabel 1 di bawah ini merangkum persepsi mahasiswa mengenai pengaruh perkuliahan terhadap aspek-aspek *civic virtue*.

Tabel 1. Persepsi Mahasiswa tentang Kontribusi Perkuliahan terhadap Aspek Civic Virtue

Aspek Civic Virtue	Deskripsi Kontribusi	Aktivitas Pembelajaran
Civic Knowledge (Pengetahuan)	Memberikan pemahaman filosofis dan kontekstual tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.	Ceramah, analisis teks sejarah, bedah buku.
Civic Skills (Keterampilan)	Mengasah kemampuan berpikir kritis, analisis masalah, argumentasi, dan dialog dalam konteks isu-isu kewarganegaraan.	Studi kasus, debat, diskusi kelompok, simulasi.
Civic Disposition (Watak/Sikap)	Menumbuhkan sikap toleransi, kepedulian sosial, komitmen pada keadilan, dan tanggung jawab sebagai warga negara.	Proyek kewarganegaraan, refleksi diri, observasi lapangan.

Meskipun demikian, pembentukan *civic disposition* merupakan aspek yang paling menantang. Banyak mahasiswa merasa bahwa perubahan sikap dan watak adalah proses personal yang tidak bisa sepenuhnya dibentuk hanya melalui perkuliahan. Seorang mahasiswa semester 7 secara reflektif menyatakan, *"Di kelas kami bisa sangat idealis, bicara tentang keadilan dan persatuan. Tapi tantangan sebenarnya adalah menerapkan itu saat berhadapan dengan situasi nyata di luar kampus, misalnya saat melihat ketidakadilan atau saat berinteraksi di media sosial."* Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual di kelas dengan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan implementasi perkuliahan Pendidikan Pancasila dalam membentuk *civic virtue* dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mendukung maupun yang menghambat.

a. Faktor Pendukung:

- 1) Kompetensi dan Kreativitas Dosen: Dosen yang tidak hanya menguasai materi tetapi juga mampu merancang metode pembelajaran yang menarik dan relevan menjadi kunci utama. Dosen yang berperan sebagai fasilitator dan teladan (*role model*) sangat diapresiasi oleh mahasiswa.
- 2) Kurikulum yang Fleksibel: Adanya ruang bagi dosen untuk mengimplementasikan metode pembelajaran inovatif seperti proyek kewarganegaraan memberikan dampak positif yang signifikan.
- 3) Karakteristik Mahasiswa PPKn: Sebagai mahasiswa yang sejak awal memiliki minat pada isu-isu sosial dan kewarganegaraan, mereka cenderung lebih reseptif dan kritis terhadap materi perkuliahan, menciptakan lingkungan belajar yang dinamis.

b. Faktor Penghambat:

- 1) Dominasi Pendekatan Teoretis: Di beberapa kelas, perkuliahan masih cenderung berfokus pada penyampaian teori dan konsep (*teaching about Pancasila*) daripada pembelajaran untuk mengamalkan nilai (*learning for Pancasila*). Hal ini menyebabkan materi terasa abstrak dan kurang menyentuh kesadaran personal mahasiswa.
- 2) Kesenjangan antara Teori dan Praktik: Mahasiswa sering melihat inkonsistensi antara nilai-nilai ideal Pancasila yang diajarkan di kelas dengan realitas sosial-politik di masyarakat, seperti maraknya korupsi dan intoleransi. Kesenjangan ini dapat menimbulkan sinisme dan apatisme.

- 3) Tantangan Internalisasi Nilai: Mengubah pengetahuan menjadi keyakinan pribadi dan perilaku konsisten (*virtue*) adalah proses internal yang kompleks. Perkuliahan formal memiliki keterbatasan dalam menjangkau ranah personal ini.

Pembahasan ini sejalan dengan pandangan Lickona (1991) tentang pendidikan karakter yang menekankan tiga komponen: *moral knowing, moral feeling, and moral action*. Implementasi perkuliahan di UNIMA telah kuat pada aspek *moral knowing* (pengetahuan), mulai mengembangkan *moral feeling* (kepedulian) melalui studi kasus, namun masih menghadapi tantangan besar dalam mendorong *moral action* (tindakan nyata) yang konsisten. Oleh karena itu, strategi pembelajaran perlu diperkaya dengan pendekatan yang lebih transformatif, seperti pembelajaran berbasis layanan (*service-learning*) yang terstruktur dan kegiatan reflektif yang mendalam untuk membantu mahasiswa menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik (Winataputra, 2019).

Diskusi Lanjutan: Menuju Pedagogi Kritis Pancasila

Temuan penelitian ini mendorong refleksi lebih jauh mengenai pendekatan pedagogis dalam Pendidikan Pancasila. Untuk benar-benar membentuk *civic virtue*, perkuliahan tidak bisa berhenti pada level transmisi pengetahuan. Diperlukan pergeseran menuju "Pedagogi Kritis Pancasila", sebuah pendekatan yang memposisikan mahasiswa sebagai subjek aktif yang secara kritis merefleksikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks realitas sosial yang kompleks dan seringkali kontradiktif. Pendekatan ini mendorong mahasiswa untuk tidak hanya memahami Pancasila, tetapi juga mempertanyakan, mengontekstualisasikan, dan memperjuangkan nilai-nilainya dalam kehidupan nyata.

Strategi dalam pedagogi kritis ini dapat mencakup beberapa hal. Pertama, penggunaan metode studi kasus yang lebih mendalam, di mana mahasiswa tidak hanya menganalisis, tetapi juga terlibat dalam dialog dengan para pemangku kepentingan dari kasus tersebut (jika memungkinkan). Kedua, integrasi yang lebih kuat antara perkuliahan dengan program-

program seperti Kampus Mengajar atau asistensi mengajar, di mana mahasiswa dapat secara langsung mengalami dan merefleksikan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Pengalaman ini, jika dibingkai dengan sesi refleksi yang terstruktur, dapat menjadi "jembatan" yang kuat untuk internalisasi nilai (Susanto, 2018).

Ketiga, menciptakan "ruang aman" di dalam kelas di mana mahasiswa dapat secara terbuka mendiskusikan keraguan, sinisme, dan dilema moral yang mereka hadapi terkait Pancasila tanpa takut dihakimi. Dialog yang jujur tentang kontradiksi antara idealita dan realita justru dapat memperkuat pemahaman dan komitmen mereka, daripada membiarkan sinisme tumbuh dalam diam. Dosen dalam hal ini berperan sebagai fasilitator dialog yang kritis dan empatik. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila bergerak dari sekadar indoktrinasi menjadi sebuah proses pencerahan kewarganegaraan yang membebaskan dan memberdayakan.

KESIMPULAN

Implementasi perkuliahan Pendidikan Pancasila di Program Studi PPKn Universitas Negeri Manado telah memainkan peran penting sebagai sarana pembentukan *civic virtue* mahasiswa dengan membangun fondasi pengetahuan (*civic knowledge*) dan mengasah keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) melalui metode pembelajaran partisipatif seperti studi kasus dan diskusi kritis. Namun, proses transformasi pengetahuan dan keterampilan tersebut menjadi watak atau kebijakan yang terinternalisasi (*civic disposition*) masih menjadi tantangan utama. Faktor penghambat seperti dominasi pendekatan teoretis di beberapa kelas dan kesenjangan antara idealita Pancasila dengan realitas sosial menjadi kendala signifikan. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran Pendidikan Pancasila dalam membentuk *civic virtue* yang utuh, diperlukan penguatan strategi pembelajaran yang lebih transformatif, reflektif, dan berorientasi pada pengalaman nyata. Pergeseran menuju pedagogi kritis yang menjembatani teori dan praktik secara efektif adalah kunci untuk melahirkan calon-calon pendidik kewarganegaraan yang

tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter dan berintegritas sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA:

- Arif, D. B. (2021). Pengembangan Kebajikan Kewargaan (Civic Virtue) dalam Masyarakat Multikultural Indonesia: Peran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 88-99. doi:10.21831/jc.v18i1.39043.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage publications.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage publications.
- Nasiwan, & Rahmia, S. (2021). Implementation of civic virtue in character education in the era of Society 5.0. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM 2020)*. Atlantis Press. doi:10.2991/assehr.k.210125.038.
- Raharjo, S. (2019). Membangun Kesadaran Hukum Mahasiswa PPKn UPY dalam Berlalu Lintas. *CIVICEDU: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 23-31. doi:10.36706/civicedu.v2i1.1491.
- Sapriya. (2017). Kajian pendidikan kewarganegaraan abad 21 untuk membentuk kecerdasan kewargaan yang berkeadaban publik. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 1-10. Universitas Lampung.
- Susanto, H. (2018). Penguatan pendidikan karakter berbasis pancasila untuk membentuk mahasiswa prodi ppkn menjadi warga negara yang baik dan cerdas. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 11(1), 55-64. Retrieved from <https://journal.upgripnk.ac.id/index.php/sosial/article/view/427>.
- Tantowi, Y. A., Sari, D. P., & Anggraini, D. (2022). Tantangan dan Strategi Implementasi Mata Pelajaran PPKn di Era Digital. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa*, 11(2), 112-125. Retrieved from <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jpbb/article/view/3849>.
- Winataputra, U. S. (2019). Implementasi Nilai Kebajikan Warga Negara (Civic Virtues) di Institut Teknologi Bandung. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 123-135. Retrieved from <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1728409&val=13639>.